

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN, TRANSPARANSI, KUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFATUR YANG *LISTING* DI BURSA EFEK INDONESIA

Remigio Da Silva Guterres

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara

Email: guterresgiofani@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research of about of the implementation of good corporate governance principles of the fairness, transparency, accountability and responsibility to earnings management. This research takes the populations of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2013. From 150 listed companies, only 83 companies that meet the criteria of the sample set, the data analysis technique with the classical assumption test, test hypothesis using multiple linear regression analysis using SPSS 20. These results show that the fairness, transparency, responsibility has a significantly impact on earnings management. While the accountability variables significantly are not affect on the earnings management.

Keywords: *manufacturing company, agency theory, earnings management, good corporate governance.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh *good corporate governance* penerapan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengambil populasi perusahaan manufaktur yang listing di Bursa efek Indonesia tahun 2010-2013. Dari 150 perusahaan yang terdaftar, hanya 83 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan, teknik analisa yang data dilakukan dengan Uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan analisa regresi linear dengan bantuan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajaran, transparansi dan tanggung jawab terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel akuntabilitas tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci: *Perusahaan Manufaktur, Teori Agensi, Manajemen Laba, Good corporate governance.*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan keagenan terjadi pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara

pemilik dan pengelola. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola perusahaan dengan menggunakan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Akan tetapi, karena adanya ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan *agent* untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, menyebabkan *agent* memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan mereka sendiri. *Agent* melakukan manipulasi data dalam menyajikan informasi akuntansi dengan melakukan manajemen laba (*earning management*) melalui *discretionary accrual*.

Laporan Keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan ekonomi yang mereka lakukan. Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam

menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang lebih baik.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah

satu bentuknya adalah *earnings management*. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan *debt holders*, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency conflict*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham).

Pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang spesifik, manajemen laba sebagai sikap oportunitis untuk memaksimalkan

kepuasannya ketika berhadapan dengan kompensasi dan perjanjian utang. Dalam hal kompensasi, perusahaan akan mengantisipasi kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba. Pemberi pinjaman akan melakukan hal yang sama dalam menentukan tingkat bunga yang mereka minta. Manajemen laba memberikan fleksibilitas kepada manajer untuk melindungi mereka sendiri dan perusahaan dalam berhadapan dengan realisasi keadaan yang tidak dapat diantisipasi terhadap kontrak (Scott 2009).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan laba yang normal adalah melalui penerapan *Good corporate governance*. Karena *corporate governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh manajer keuangan untuk melakukan kontrol terhadap manajer guna memastikan bahwa manajer keuangan perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer. Dalam posisinya sebagai sebuah mekanisme, *corporate governance* diterapkan melalui jumlah aturan dan norma-norma yang diberlakukan pada seluruh bagian dalam perusahaan. Aturan dan norma-norma ini pada tahap awal akan mengatur pola hubungan antara dewan direksi pemegang saham, dan manajer. Dalam konteks tersebut, *corporate governance* dapat dipandang sebagai langkah untuk meminimalkan terjadinya *agency conflicts* dalam perusahaan (Aries, 2011). Krisis ekonomi memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung dengan struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang acak-acakan dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa *corporate governance* (CG) merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Penerapan *good corporate* di Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Mckinsey melibatkan investor di Asia, dan Amerika terhadap lima Negara di Asia. Ditemukan bahwa, Indonesia menduduki posisi paling terakhir dalam melaksanakan *good corporate governance*.

Rumusan masalah penelitian mengungkapkan bahwa sebagai sebuah solusi untuk meminimumkan manajemen laba adalah melalui penerapan *good corporate governance* yang terdiri dari empat prinsip utama, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

KAJIAN PUTAKA

Menurut Adrian (2012) mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan meyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional, para tenaga profesional bertugas untuk

kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham.

Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asimetri (Kesenjangan informasi) Antara Pemegang Saham (*Stakeholders*) dan organisasi. Deskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi. Jensen (2008) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian.

Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor yaitu: (1) Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri; (2) Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbalan jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Menurut Adrian (2012) konflik yang menimbulkan adanya biaya agensi sebagai berikut: (1) Biaya yang berpotensi muncul akibat dari pemberian dividen yang berlebihan pemberian dividen secara berlebihan menguntungkan pemegang saham dan merugikan pemberi pinjaman karena menurunnya likuiditas yang bermanfaat untuk membayar utang yang jatuh tempo; (2) Biaya karena dikeluarkannya pinjaman baru namun dengan peringatan yang lebih senior dibanding dengan peringkat pinjaman lain; (3) Biaya yang muncul karena adanya *asset substitution*. Digunakannya pinjaman, menyebabkan ada sebagian aset perusahaan atau seluruhnya yang dijadikan kolateral pinjaman-pinjaman; (4) Biaya karena kebangkrutan. Penggunaan pinjaman memperbesar peluang kebangkrutan; (5) Biaya karena *under investment*, Investasi membuat penjualan perusahaan berpeluang tumbuh; (6) Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan dilakukannya reorganisasi struktur modal; (7) Biaya *monitoring*. Biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan pemberi pinjaman mengharuskan dilakukannya evaluasi atas pemberi pinjaman mengharuskan; (8) Biaya *bonding*. Biaya yang dikeluarkan untuk mengikat pengelola perusahaan secara yuridis yang berkaitan dengan penggunaan pinjaman.

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan, menurut Belkaoui dan Scott (2006) mengungkapkan bahwa manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer mempunyai perilaku *oportunistik* dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif-alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Menurut Okta (2010) terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba (*earnings management*) yaitu: (1) Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi; (2) Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Faktor-faktor yang mendorong tindakan manajer dalam melakukan kegiatan manajemen laba menurut Scott (2009) adalah: (1) Kontrak Bonus. Laba sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan. Oleh karena itu, jika manajer perusahaan yang memperoleh laba di bawah target laba, maka akan melakukan manipulasi laba agar memperoleh bonus yang maksimal di periode mendatang. (2) *Stock Price Effect*. Manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk mempengaruhi pasar. (3) Faktor Politik. Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, dilakukan dengan cara menurunkan laba, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya, dilakukan dengan cara menurunkan laba untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh. (4) Faktor Pajak. Pada periode terjadi kenaikan harga (inflasi), penggunaan LIFO akan menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dan pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih rendah. Jadi manajer perusahaan berusaha menurunkan laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan perusahaan. (5) Penawaran Saham Perdana (IPO). Pada umumnya, perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana *Initial Public Offering* (IPO) melakukan aktifitas manajemen laba pada periode terakhir sebelum IPO. Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting dan utama. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan untuk mempengaruhi calon investor, maka manajer berusaha untuk menaikkan laba yang dilaporkan, agar harga saham tinggi pada saat *Initial Public Offering* (IPO).

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Menurut Mas (2014:9) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai suatu pola hubungan, system, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. (2) Menurut Adrian (2012:1) mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. (3) *Center for European policy study* (CEPS) (2012) mengungkapkan bahwa GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. (4) Menurut Wahyudin (2008:35) *good corporate governance* merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. (5) Menurut FCGI (2006) FCGI mendefinisikan *corporate governance* yang disadur dari *Cadbury Committee of United Kingdom* sebagai Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (6) Menurut Effendi (2008) Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) Tahun (2012) mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terdapat 5 prinsip yang ditemukan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam penerapan GCG dikarenakan sangat berkaitan dengan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut yang nantinya akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) (2012), manfaat dari pelaksanaan GCG adalah, menjaga *sustainability* perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar, mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*, meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, dan membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Setelah defenisi *good corporate governance* di atas maka di dalam buku Lead By GCG yang ditulis oleh Mas (2014) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* memiliki lima prinsip dasar yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi). Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material yang berdampak signifikansi pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Menurut peraturan pasar modal Indonesia, informasi materi relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan, naik turunnya harga saham perusahaan, atau mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

2. *Accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam lingkup pemerintahan Republik Indonesia LAN RI dibantu oleh BPKP (2001) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Implementasi dari prinsip akuntabilitas berarti adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris. Untuk meningkatkan kinerjanya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapepam pada tanggal 5 Mei 2000 tentang komite audit, ketentuan-ketentuan bagi perusahaan publik dalam membentuk komite audit adalah sebagai berikut: **Pertama**. Struktur komite audit: (a) Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan komisaris; (b) Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen emiten atau perusahaan publik, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen; (c) Anggota komite audit yang berasal dari komisaris perusahaan bertindak sebagai ketua komite audit. **Kedua**. Persyaratan keanggotaan: (a) Pihak eksternal yang diangkat menjadi anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris atau pemegang saham utama; (b) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik; (c) Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Ketiga. Tugas komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris yang antara lain meliputi: (a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; (b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan undang-undang di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan; (c) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. **Keempat**. Rapat komite audit: (a) Komite audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan; (b) Rapat komite audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota; (c) Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota komite audit yang hadir. **Kelima**. Tanggung jawab pelaporan: (a) Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan; (b) Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. **Keenam**. Masa tugas. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas komisaris perusahaan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban). Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar pengajian, dan persaingan yang sehat.

Menurut Bamban (2013) mengungkapkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya meliputi empat tema yaitu: (1) Kemasyarakatan. Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni, serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya; (2) Ketenagakerjaan. Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya; (3) Produk dan konsumen. Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, *urability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya; (4) Lingkungan. Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam suatu perusahaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris karena pada intinya *corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibilitas* ini diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapat manfaat dari mekanisme pasar.

4. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). *Fairness* didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam memberikan pendapatnya, auditor dapat memilih tipe, menurut Abdul (2014) mengungkapkan bahwa ada lima pendapat yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu: (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum; (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum; (3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan dan auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum; (4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*). Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum; (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion* atau *no opinion*).

Pernyataan ini tidak memberikan pendapat layak diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum.

Hipotesis

Prinsip dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dan dalam konteks ini KNKG (2006) menegaskan hal-hal sebagai berikut bahwa: (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Prinsip kewajaran menekankan adanya jaminan dan memperhatikan kepentingan pemegang saham pemangku lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan Fitrawansyah (2014). Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Namun demikian, pemilik juga memerlukan jaminan bahwa laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen benar menggambarkan konsekuensi keputusan manajemen dan kinerjanya Soegiharta, (2005). Mengacu pada *best practice and good corporate governance*, diperlukan peranan auditor independen untuk memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan Tristiarini (2005).

Dengan penerapan prinsip kewajaran ini, perusahaan dianggap telah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Kewajaran dimaksud tercermin dari opini yang diberikan oleh auditor independen yang mengaudit laporan keuangan yang disajikan. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip kewajaran dalam pengelolaan perusahaannya pada umumnya akan menyajikan laporan secara wajar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengindikasikan adanya manajemen laba. Dari paparan tersebut dirumuskan hipotesis:

H1: Prinsip kewajaran berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

Prinsip transparansi dan manajemen laba

Prinsip dasar asas transparansi (*transparency*) adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih lanjut KNKG (2006) menyebutkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya; (2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi,

misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan; (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholder* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparansi pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dari konglomerat. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang menkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko dan pertambahan dari perubahan modal. Asimetri informasi antara pengelola dan pemilik sebagai pengguna laporan keuangan menyebabkan pemilik dalam hal ini pemegang saham tidak dapat mengamati seluruh kinerja dan prospek perusahaan secara sempurna. Dalam situasi dimana pemegang saham memiliki informasi yang lebih sedikit dibanding dengan pengelola, dalam kondisi ini manajer dapat dengan leluasa menggunakan fleksibilitasnya untuk melakukan manajemen laba. Semakin banyak dan lengkap informasi yang diungkapkan maka akan semakin sedikit asimetri informasi yang artinya fleksibilitas manajer dalam melakukan manajemen laba akan semakin berkurang Adrian (2012). Perusahaan yang mengungkapkan informasi lebih banyak dan tepat waktu dianggap dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan dilakukannya manajemen laba. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Prinsip transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Prinsip akuntabilitas dan manajemen laba

Prinsip dasar asas akuntabilitas (*accountability*) adalah bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam konteks ini KNKG (2006) menyebutkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan; (2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan; (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem

penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*); (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

Pendelegasian tugas dan wewenang kepada direksi untuk mengelola perusahaan oleh rapat umum pemegang saham mengakibatkan seluruh pengelolaan perusahaan dilimpahkan kepada dewan direksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan agar dewan direksi tidak melampaui kewenangan. Tugas pengawasan tersebut diserahkan kepada dewan komisaris oleh para pemegang saham. Agar kinerja pengawasan optimum, maka komisaris dibantu oleh komite audit yang berasal dari pihak eksternal yang independen dan tidak memiliki hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, direksi, komisaris atau pemegang saham. Adrian (1012) pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan. Di banyak perusahaan, manajemen perusahaan duduk dalam dewan pengurus, sehingga terdapat kurangnya *accountability* dan berpotensi untuk timbulnya konflik kepentingan. Peneliti lain yaitu Chtorou *et al.* (2001) membuktikan dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang memiliki standar pengawasan dan *monitoring* pelaporan keuangan yang jelas dan proporsi komite audit dari pihak luar lebih banyak, memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, dalam penelitian yang sama dibuktikan bahwa jika komite audit melakukan rapat lebih dari dua kali dalam setahun memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah dibanding komite audit yang melakukan rapat hanya sekali saja dalam setahun.

H3: Prinsip akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Prinsip responsibilitas dan manajemen laba

Prinsip dasar asas responsibilitas (*responsibility*) adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dan dalam konteks ini KNKG (2006) menegaskan beberapa hal sebagai berikut bahwa: (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*); (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Tanggung jawab pengelola dalam hubungan keagenan bukan hanya sebatas pengelolaan keuangan dan segala sumber daya yang dilimpahkan untuk dikelola, akan tetapi termasuk dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Totok (2014).

H4: Prinsip responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Diskriptif Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. BEI juga berperan dalam upaya mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk menciptakan pasar modal Indonesia yang stabil. Cikal bakal BEI

berawal dari berdirinya bursa saham di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke 19 tepatnya tahun 1912. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan kemudian dibuka lagi pada 1925. Selain Bursa Batavia, pemerintah kolonia juga mengoperasikan Bursa Paralel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham berhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956, dan tidak sampai 1977, bursa saham dibawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan perkembangan pasar 98 industri 98 dan sektor swasta. Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham yang saat itu bernama bursa saham diprivatisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Swastanisasi Bursa Saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru, dimana pada tanggal 22 Mei 1995, BEJ meluncurkan Jakarta *Automated Trading System* (JATS), sebuah 98 industri perdagangan otomatis yang menggantikan system perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang *fair* dan transparan 98 industri perdagangan manual. Pada tahun 2007, PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menggabungkan usahanya dan berdirilah PT Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian dari saat itu hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki satu pasar modal yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI). 02 Maret 2009 Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena bertujuan meneliti pengaruh sebab akibat antara dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen, objek penelitian ini adalah menerapkan pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen laba melalui laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Manajemen laba disini dapat dideteksi melalui *discretionary accrual* (DA) dan nilai ini dapat dihitung dengan menggunakan *modified Jones* atau disebut dengan *Jones Index*, model ini mampu mendeteksi manajemen laba.

Variabel independen dalam penelitian ini tentang Prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan variabel prinsip kewajaran, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan responsibilitas.

Pengukuran variabel

Variabel ini akan diukur melalui *modified jones* atau sering juga disebut sebagai *Jones Index* suatu model yang mampu mendeteksi adanya manajemen laba (Dechow et al). model tersebut ditulis sebagai berikut

$$TA=NI_{it} - COF_{it} \dots \dots \dots 1$$

dimana: TAC_{it} = total akrual perusahaan i pada periode t; N_{it} = laba bersih perusahaan i pada periode t; CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t.

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut:

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e \dots \dots \dots 2$$

Dimana: A_{it-1} = total aktiva perusahaan i pada periode t-1; ΔREV_{it} = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t; ΔREC_{it} = perubahan piutang bersih perusahaan i pada periode t; PPE_{it} = aktiva tetap perusahaan i pada periode t; α₁, α₂, α₃ = koefisiensi regresi.

Dengan menggunakan koefisiensi regresi di atas, nilai non discretionary accruals (NDA)

Dapat dihitung dengan rumus:

$$NDAC_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) \dots \dots \dots 3$$

Keterangan: NDAC_{it} = nilai non discretionary accrual perusahaan i pada periode t; α₁, α₂, α₃ = *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi persamaan (2)

Discretionary accrual merupakan bagian dari *total accrual* yang diperoleh dari estimasi *total accrual* dan dihitung sebagai berikut:

Selanjutnya discretionary accruals (DA) dapat dihitung sebagai berikut

$$TAC_{it}/A_{it-1} = NDAC_{it} + DAC_{it} \dots \dots \dots 4$$

$$DAC_{it} = TAC_{it}/A_{it-1} - NDAC_{it} \dots \dots \dots 5$$

Keterangan: DA_{it} = *Discretionary Accrual* perusahaan i pada periode t; NDA_{it} = *Non Discretionary Accrual* perusahaan I pada periode t; TA_{it} = *Total accrual* i pada periode t; N_{it} = Laba bersih perusahaan I pada periode t; CFO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t; A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t; ΔPO_{it} = Pendapatan operasi perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan operasi perusahaan i pada periode t-1; ΔPIUT_{it} = Piutang neto perusahaan i pada t dikurangi piutang neto perusahaan i pada periode t; e = error

Variabel kewajaran (X1)

Variabel ini akan diukur dengan pendapat auditor, pendapat dari auditor independen tersebut diberi bobot sebagai berikut: (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberi bobot 5 (lima); (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, diberi bobot 4 (empat); (3) Pendapat wajar dengan pengecualian, diberi bobot 3 (tiga); (4) Pendapat tidak wajar, diberi bobot 2 (dua); (5) Pernyataan tidak memberikan pendapat, diberi bobot 1 (satu).

Variabel transparansi (X2)

Variabel ini akan diukur melalui laporan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam, laporan tahunan yang terdiri dari: (1) Kelengkapan laporan keuangan: (a) Laporan laba rugi diberi bobot 1 (satu); (b) Laporan perubahan ekuitas diberi bobot 1 (satu); (c) Laporan arus kas diberi bobot 1 (satu); (d) Catatan atas laporan keuangan diberi bobot 1 (satu). Dengan demikian bila perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap akan diberi bobot 5 (lima). (2) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No X.K.2, Lampiran keputusan ketua Bapepam No. Ke.36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan Pada keputusan ketua Bapepam dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya, akan diberi bobot 1 (satu). Tetapi apabila tidak tepat waktu akan diberikan bobot 0. (3) Kelengkapan laporan non keuangan. Selain laporan yang bersifat keuangan, keterbukaan informasi juga menyangkut adanya pengungkapan informasi yang bersifat non keuangan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/2003, kelengkapan laporan non keuangan terdiri dari laporan manajemen, ikhtisar data keuangan penting, dan analisis dan pembahasan umum oleh manajemen.

Apabila perusahaan mengungkapkan informasi yang bersifat non keuangan tersebut akan diberi bobot sebagai berikut: (1) Laporan manajemen diberi bobot 1 (satu); (2) Ikhtisar data keuangan penting diberi bobot 1 (satu); (3) Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen diberi bobot 1 (satu). Dengan demikian apabila ketiga kelengkapan non keuangan tersebut disampaikan maka akan mendapat bobot 3 (tiga).

Variabel akuntabilitas (X3)

Variabel ini akan diukur melalui Surat Keputusan No. 01/KOM/MAS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, dengan surat edaran tersebut maka penilaian akuntabilitas adalah sebagai berikut: (1) Apabila perusahaan memiliki komite audit yang lengkap sesuai ketentuan (terdiri dari 3 orang dan dipimpin oleh seorang komisaris independen) diberi bobot 1 (satu); (2) Apabila perusahaan mengumumkan laporan komite audit dalam laporan tahunan, akan diberikan bobot 1 (satu); (3) Apabila komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya dalam 3 bulan, akan diberi bobot 1 (satu). Dengan demikian, apabila perusahaan memenuhi semua komponen dalam variabel ini akan diberi bobot 3 (tiga).

Variabel responsibilitas (X4)

Variabel ini akan diukur diukur dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap produk dan konsumen, ketenagakerjaan, kemasyarakatan dan lingkungan hidup, Penilaian atas variabel ini dilakukan berdasarkan empat komponen yaitu: (1) Pengungkapan atas tema produk dan konsumen diberi bobot 1 (satu); (2) Pengungkapan atas tema kemasyarakatan diberi bobot 1 (satu); (3) Pengungkapan atas tema ketenagakerjaan diberi bobot 1 (satu); (4) Pengungkapan atas tema lingkungan hidup diberi bobot 1 (satu)

Populasi

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari berbagai jenis yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annually report*) yang diaudit dan dipublikasikan di bursa efek Indonesia (BEI), website www.jdx.co.id. periode 2010-2013.

Sampel Penelitian

Dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian, yang menjadi kriteria peneliti adalah: (1) Perusahaan manufaktur yang *listing* di bursa efek Indonesia dari berbagai sektor; (2) Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 desember 2010-2013), baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data yang diperlukan untuk dideteksi manajemen laba.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu: (1) Data sekunder yang sudah disediakan oleh organisasi berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) sehingga peneliti tinggal menggunakannya; (2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku dan jurnal akuntansi.

Metode Analisis. Untuk menyeleksi faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap manajemen laba maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Imam (2013) mengemukakan bahwa uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan grafik plot.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat dari histogram dari residualnya. Dasar keputusannya: (a) Jika data meyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; (b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Imam (2013) mengungkapkan bahwa pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah: (1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi; (2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal merupakan indikasi adanya multikolonieritas; (3) Multikolonieritas dapat juga dari nilai tolerance dan lawannya dengan variance inflation factor (VIF). Kedua variabel ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dengan pengertian sederhana adalah nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (arena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan $VIF > 10$. Misalnya nilai toleransi = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Santoso (2013:139) Dalam SPSS metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot yang menunjukkan hubungan antara Regression Studentised Residual dengan *Regression Standardized Predicted Value*. Dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah: (1) Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas; (2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Koefisiensi determinasi

Menurut Imam (2013:97) Koefisiensi determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai determinasinya adalah 0 dan 1, jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen amat terbatas. Apabila nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Menurut Imam. (2013:98). Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen; (2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statisti T)

Menurut Imam (2013:99) uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerapkan variabel dependen. Hipotesis 0 (H_0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan 0 atau: $H_0: b_i = 0$ Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel lebih besar daripada nol, atau : $H_A = b_1 > 0$ Artinya suatu variabel independen X_1 merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen Dengan $\alpha = 5\%$ maka untuk menentukan apakah pengaruhnya signifikan atau tidak dilakukan analisis melalui peluang alatnya (p) dengan kriteria sebagai berikut: (1) $p > 0,05$ maka dikatakan non signifikan atau H_0 diterima; (2) $0,05 > p > 0,01$ maka dinyatakan signifikan atau H_0 ditolak; (3) $p < 0,01$ maka dinyatakan sangat signifikan atau H_0 ditolak.

Cara melakukan uji T adalah sebagai berikut: (1) *Quick look*: Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak, bila nilai positif lebih besar daripada 2 (dalam nilai absolut) dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen; (2)

Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Persamaan regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba adalah:

$$DA_{it} = b_0 + b_1PK + b_2PT + b_3PA + b_4PR + e$$

Keterangan: DA_{it} : *Discretionary accrual*; b : Koefisiensi regresi; b_1PK :Prinsip kewajaran ; b_2PT : Prinsip transparansi; b_3PA : Prinsip akuntabilitas; b_4PR : Prinsip responsibilitas; e : *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik diskriptif memberikan gambaran atau diskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Tabel 1 dibawah ini merupakan statistik diskriptif dari variabel-variabel yang digunakan.

Tabel 1.Statistik Diskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajaran	83	4.00	5.00	4.7831	.41462
Transparansi	83	8.00	9.00	8.7229	.45029
Akuntabilitas	83	1.00	3.00	2.5783	.52080
Responsibilias	83	1.00	4.00	2.4940	.77102
Manajemen Laba	83	-2.93	1.83	-2917	.87285
Valid N (listwise)	83				

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kewajaran mempunyai nilai rata-rata 4.7831. sedangkan nilai minimum 4.00 dan nilai maksimal adalah 5.00 sedangkan nilai standar deviasi adalah 0.41462. data ini menunjukkan bahwa rata-rata penerapan prinsip kewajaran di perusahaan manufaktur di Indonesia masih tergolong sedang, yaitu hanya sebesar 4.7831. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kewajaran tergolong baik karena nilai standar deviasinya dibawah 2,5.

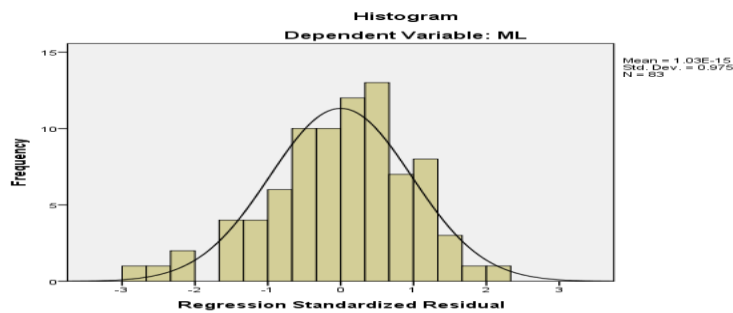
Variabel transparansi dengan nilai minimum sebesar 8.00, sedangkan nilai maksimum 9.00, nilai mean penerapan prinsip transparansi sebesar 8.7229, nilai standar deviasi 45029, data ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerapan prinsip tranparansi terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia cukup tinggi, dengan nilai 8.7229. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kewajaran tergolong baik karena nilai standar deviasinya dibawah 2,5.

Variabel penerapan akuntabilitas dengan nilai minimum 1.00, nilai maksimum 3.00, sedangkan nilai mean sebesar 2.5783, nilai standar deviasi 0,52080, data ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerapan prinsip akuntabilitas terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia rendah, yaitu dengan nilai sebesar 2.5783. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas tergolong baik karena nilai standar deviasinya di bawah 2.5.

Variabel penerapan responsibilitas dengan nilai minimum 1.00, nilai maksimum 4.00, sedangkan nilai mean sebesar 2.4940, nilai standar deviasi dengan nilai sebesar 0,77102, data ini menunjukkan bahwa nilai-rata penerapan prinsip responsibilitas perusahaan manufaktur terhadap tema produk dan konsumen, masyarakat, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup masih rendah, yaitu dengan nilai sebesar 2.4940. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel responsibilitas tergolong baik karena nilai standar deviasinya di bawah 2.5.

Uji Asumsi Klasik dan Kualitas Instrumen Penelitian

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan terhadap penelitian ini diperoleh sebagai berikut:



Grafik 2. Hasil Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kiri atau tidak menceng ke kanan. Sedangkan pada normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, maka model dalam penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas.

Hasil Analisa Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2010-2013
Coefficient Correlations^a

Model		Responsibilias	Transparansi	Kewajaran	Akuntabilitas	
1	Correlaions	Responsibilitas	1.000	-.016	-.022	.141
		Transparansi	-.016	1.000	.064	-.012
		Kewajaran	-.022	.064	1.000	.085
		Akuntabilitas	.141	-.012	.085	1.000
1	Covariances	Responsibilitas	.013	.000	-.001	.003
		Transparansi	.000	.037	.003	.000
		Kewajaran	-.001	.003	.045	.003
		Akuntabilitas	.003	.000	.003	.029

a. Dependent variabel :ML

Model	oefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic

1	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
(Constant)	8.736	2.104		4.152	.000	
Kewajaran	-.502	.211	-.238	-2.378	.020	.987
Transparansi	-.629	.194	-.325	-3.251	.002	.995
Akuntabilitas	-.155	.169	-.092	-.913	.364	.972
Responsiilitas	-.297	.114	-.263	-2.609	.011	.979

a. Dependent variabel: ML

Dari Tabel 3 hasil besaran korelasi antara variabel independent menunjukkan bahwa nilai variabel independen dibawah 95%, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. Hasil nilai tolerance menunjukkan bahwa perhitungan tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variance independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation faktor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel yang memiliki lebih dari 10. jadi disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang multikolinearitas.

Hasil Analisa Regresi Linier

Dari analisa pengaruh antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen laba pada tahun 2010-2013 di peroleh hasil seperti pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa besarnya koefisiensi determinasi dengan nilai 0,476. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas sebesar 22,6% sedangkan sisanya 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai Error of estimasi (SEE) dengan nilai 0.476, makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square) 2010-2013

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 ^a	.226	.186	.78729

a. Predictors: (Constant), Responsibilitas, Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: ML

Hasil Analisa Regresi (Uji F)

Dari Tabel analisa pengaruh antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen laba pada tahun 2010-2013 di peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.127	4	3.532	5.698	.000 ^b
1 Residual	48.346	78	.620		
Total	62.474	83			

a. Dependent Variable: ML

b. Predictors: (Constant), Responsibilitas, Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas

Dari Tabel dapat dilihat bahwa taraf signifikansi 0,05 diperoleh F hitung sebesar 5,698 dengan probabilitas 0,000^a, karena nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi untuk mendeteksi manajemen laba, dapat dikatakan bahwa Variabel kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil Analisa Uji Statisti T

Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

Tabel 6. (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.736	2.104		4.152	.000
	Kewajaran	-.502	.211	-.238	-2.378	.020
	Transparansi	-.629	.194	-.325	-3.251	.002
	Akuntabilitas	-.155	.169	-.092	-.913	.364
	Tanggung jawab	-.297	.114	-.263	-2.609	.011

a. Dependent Variable: ML

Dari ke empat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi variabel kewajaran, transparansi dan tanggung jawab berpengaruh terhadap manajemen laba hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk variabel kewajaran 0,020, akuntabilitas 0,002 dan variabel tanggung jawab 0,011 ketiga variabel independen ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel akuntabilitas dengan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dipengaruhi oleh variabel kewajaran, transparansi dan tanggung jawab, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan dengan persamaan matematis adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,736 - 0.508PK - 0,629PT - 0.155PA - 0.297PR + E$$

Berdasarkan tabel interpretasinya adalah sebagai berikut

1. $b_0 = 8,736$

Dari persamaan tersebut di atas nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 8,736 hal ini memberikan gambaran pada variabel memiliki nilai 0, maka nilai Y atau indeks pengungkapan MI adalah 8,736 satuan.

2. $b_1 = -0.508$

Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa prinsip kewajaran mempunyai pengaruh yang negatif -0.508 terhadap ML hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan prinsip kewajaran maka MI akan turun -0.508 .

3. $b_2 = -0,629$

Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa prinsip transparansi mempunyai pengaruh yang negatif -0.629 terhadap ML hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan prinsip transparansi maka ML akan turun -0.629 .

4. $b_4 = -0.155$

Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa prinsip akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif -0.155 terhadap ML hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan prinsip transparansi maka ML akan turun -0.155.

5. $b_5 = -0.297$

Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa prinsip akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif -0.297 terhadap ML hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan prinsip transparansi maka ML akan turun -0.297.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian yang ditunjukkan dengan angka regresi dan tingkat signifikansi yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat diketahui pengaruh antara variabel independen yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba sebagai berikut: (1) Hipotesis pertama (H_1) mengatakan bahwa prinsip kewajaran berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran kewajaran sebesar $0.020 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh prinsip kewajaran terhadap manajemen laba. (2) Hipotesis kedua (H_2) mengatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran transparansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh prinsip kewajaran berpengaruh terhadap manajemen laba. (3) Hipotesis kedua (H_3) mengatakan bahwa prinsip akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. ukuran transparansi sebesar $0.364 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap manajemen laba. (4) Hipotesis keempat (H_4) mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran tanggung jawab sebesar $0.011 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh prinsip tanggung jawab terhadap manajemen laba.

Pembahasan. Hasil uji t untuk variabel prinsip kewajaran menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai nilai signifikansi 0,020 yang berarti berada di bawah taraf signifikansinya 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan prinsip kewajaran berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan dapat diterima (H_1 dapat diterima). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Paham (2013) yang menemukan hasil yang tidak sama dimana prinsip kewajaran tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil uji t variabel transparansi menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai nilai signifikan 0.002 yang berarti berada di bawah taraf signifikansinya 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan prinsip transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan dapat diterima (H_1 dapat diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya Paham (2013) melakukan penelitian di bursa efek Indonesia hasil penelitian untuk prinsip kewajaran berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian variabel akuntabilitas uji t variabel menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai nilai signifikan 0.364 yang berarti berada di atas taraf signifikansinya 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan dapat ditolak (H_1 dapat ditolak). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Yusriati dan Eliada

(2010) yang mengatakan bahwa prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian untuk prinsip responsibilitas uji t variabel transparansi menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai nilai signifikan 0.011 yang berarti berada di bawah taraf signifikansinya 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan prinsip transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan dapat diterima (H_1 dapat diterima). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Elsa (2006) yang mengatakan bahwa prinsip responsibilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Prinsip kewajaran terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; (2) Prinsip transparansi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; (3) Prinsip akuntabilitas tidak terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba; (4) Prinsip responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2012) *Good Corporate Governance* Jl. Sawo Raya Grafika Jakarta
- Achmad, H. (2005) *9 kunci sukses tim sukses pilkada langsung*.
- Badai, S. P. (2013) Prinsip – prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
- Bursa Efek Indonesia. *Sejarah BEI*. <http://www.jsx.co.id>
- Banbang, R, & Melia, F (2013) *CSR (Corporate Social Responsibility)* Penerbit Rekayasa Sains, Bandung 40264
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard dan Lucie Courteau. (2001) “Corporate Governance and Earnings Management”. *Working Paper*. <http://www.papers.ssrn.com>
- Constatinos, C. & Chistos, T. (2010) The effect of mandatory adoption of corporate governance corporate governance mechanisms on earnings manipulation, management and firm financing hlm 1 dan 2
- Chi-keun, M. (2013) *Corporate governance and earning manajemen: a suvey*, hlm 409.
- Elisa Trihapsari, (2006) “Analisa korelasi antara penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* dengan manajemen laba pada emiten bursa efek Jakarta”. *Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Paska Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Eddy S. S. (2008) *Marketing research* Bandung.
- Hasanuddin, R.D.N (2004) *Manajemen Fit & Proper Test* Yogyakarta: PPW.
- Kresnohadi Ariyoto, dkk. (2000) “*Good Corporate Governance* dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya”. *Usahawan*. No. 10 th XXIX.
- Luhglatno. (2008) Mencegah tindakan manajemen laba dengan mekanisme *corporate governance* hlm 34
- Mas, A.D (2014) *Lead By GCG* Cetakan Pertama Februari

- Ni, W. Y. M. G. W. (2007) Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* dan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi hlm, 1-3
- Parwoto Wignjohartojo. (2001) “*Good Corporate Governance: Implementasi beserta Implikasi dan Masa Depan*nya. *Majalah Ekonomi*. Tahun XI No. 1.
- Puput Tri Komalasari. (2001) “Asimetri Informasi, *Positive Accounting Theory* dan Manajemen Laba”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 2. pp.92-111
- Pratana Puspa Midiastuty dan Mas’ud Machfoedz. (2003). “Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Indikasi Manajemen Laba”. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Richardson, V.J. (1998) “Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence”. *Working Paper*. <http://www.papers.ssrn.com>
- Rachmat Saleh. (2004) “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.
- Rindang, W. & Asteria P. (2007) Analisa hubungan peranan budaya penerapan *good corporate governance* pada PT Aneka tambang Tbk, hlm 130-132.
- Rahmawati, H. S. (2012) Analisa peran *Good Corporate Governance* dalam mengatasi penagru manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan: studi pada Prusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, hlm 97-98.
- Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, (2002) Pedoman dan peyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten perusahaan publik Industri manufaktur http://www.iapi.or.id/member_area/PLK/Industri%20Manufaktur.pdf
- Syed, Z. A.S & Safdar, A. B. & Arshad, H. (2009) *Corporate governance and earning manajement a empirical evidence form Pakistani listes companies*, hlm 635
- Stergios, L. (2012) *the role of corporate governance in earning manajement: experience from US banks*, hlm,1-2
- Sulistyanto, H. S. (2008) Manajemen laba teori dan model empiris.
- Stephen, P. R. (2008) Perilaku organisasi edisi 12.
- Yusriati, N. F, & Yuli, P. & Eliada, H. (2010) *Pengaruh corporate Governance terhadap timbulnya earning manajement dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia*.
- Yoni, F.S. Siti, K. (2008) ”Pengaruh Penerapan *good corporate governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatra selatan” *Jurnal Akuntansi*, Vol. X, no. 2, hal 3-6
- Wolk, Harry I. dan Michael G. Tearney. 1997. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. 4th Edition. *South Western College Publishing: Cincinnati*.